

ABSTRAK

Seorang pecandu yang perkaranya diperiksa pada sidang pengadilan, maka menjadi kewenangan hakim untuk tidak memenjarakan pecandu tersebut bila ia terbukti melakukan tindak pidana melainkan diputus untuk menjalani rehabilitasi. Dalam mengambil suatu putusan, hakim pada dasarnya telah diberikan kebebasan untuk memutus tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Hal tersebut karena suatu putusan hakim merupakan refleksi dari penegakan hukum dan keadilan. Namun kebebasan hakim diartikan sebagai kebebasan sekehendak hati karena tentu kebebasan diberikan dengan tujuan untuk menegakkan prinsip keadilan dan kebenaran.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonstruksi sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba berbasis nilai keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder. Sumber data diperoleh dengan melakukan studi pustaka melalui bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier yang berkaitan dengan sanksi pidana dan tindak pidana narkoba Indonesia. Kemudian data yang diperoleh di analisa dengan menggunakan analisa kualitatif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan tindak pidana narkoba merupakan salah satu tindak pidana yang berat dan serius karena UU No. 35 Tahun 2009 mengatur tentang ketentuan pidana minimum khusus. Kelemahan-kelemahan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba yang diterapkan saat ini seperti pidana penjara tidak menimbulkan efek jera dan menyebabkan jumlah warga binaan berlebih bila dibanding dengan jumlah daya tampung rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan.

Rekonstruksi sanksi pidana pelaku tindak pidana narkoba, Pidana kerja sosial dan restitusi diharapkan mampu menjadi jawaban atas kelemahan pidana penjara dan rehabilitasi yang selama ini diterapkan. Rekomendasi dari peneliti adalah perlu adanya reformasi terhadap sanksi pidana penjara dan rehabilitasi yang selama ini diterapkan sehingga mampu memenuhi nilai berkeadilan, pidana kerja sosial dan restitusi sebaiknya segera diterapkan untuk menjawab permasalahan yang selama ini terjadi terkait dampak penerapan sanksi pidana penjara dan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkoba.

Kata kunci : Pidana, Sanksi Pidana, Narkoba, Pidana Kerja Sosial

ABSTRACT

An addict whose case is examined at a court hearing, then it becomes the judge's authority not to imprison the addict if he is convicted of a criminal offense but instead is sentenced to undergo rehabilitation. In taking a decision, the judge has basically been given the freedom to decide without any intervention from any party.

That is because a judge's decision is a reflection of law enforcement and justice. However, the freedom of judges should not be interpreted as freedom at will because freedom is granted with the aim of upholding the principles of justice and truth.

This study aims to analyze the reconstruction of criminal sanctions for perpetrators of narcotics-based criminal justice. This study uses a normative juridical approach that is analytical descriptive using secondary data. Sources of data obtained by conducting library research through primary, secondary and tertiary legal materials relating to criminal sanctions and criminal acts of Indonesian narcotics. Then the data obtained were analyzed using qualitative analysis.

The results of the study concluded that narcotics crime is one of the serious and serious criminal offenses UU No.35 of 2009 regulates the specific minimum criminal provisions. Weaknesses of criminal sanctions for narcotics offenders currently applied such as imprisonment do not cause a deterrent effect and cause an excessive number of inmates when compared to the tamping power of detention centers and correctional institutions. The reconstruction of criminal sanctions for narcotics, social work and restitution crimes is expected to be an answer to the weaknesses of imprisonment and rehabilitation that have been applied so far.

Recommendations from researchers are the need for reforms of imprisonment and rehabilitation sanctions that have been implemented so that they are able to meet the values of justice, social work and restitution should be immediately applied to address problems that have occurred related to the impact of the application of imprisonment and rehabilitation sanctions for offenders narcotics.

Kata kunci : Criminal, Criminal Sanctions, Narcotics, Criminal Social Work